(2023), 1 (5): 1–8 Kultura 2985-5624
Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

Dampak Pemindahan Ibukota Negara Baru terhadap Ekonomi dan Sosial di Provinsi Kalimantan Timur

Gunawan Aji[1] ,Zidni Arfani [2], Ayu Mila Sari[3], Rahma Seprtiani[4]
[1,2,3]UIN K.H. Abdurrahman Wahid
Email: gunawanaji@uingusdur.ac.id[1] ,zidniarfani@mhs.uingusudur.ac.id [2],ayumilasari@mhs.uingusdur.ac.id [3], rahmaseptiani@mhs.uingusdur.ac.id [4]

Submitted: 10 December 2023 Accepted: 19 December 2023 Published: 20 December 2023

Abstract

The move of the National Capital to East Kalimantan was driven by socio-economic and population inequality. The aim of moving the National Capital outside Java is to reduce ecological burdens such as severe traffic jams, as well as increased air and air pollution. It is possible that the relocation of the National Capital could cause various problems in the social, economic and political fields. This research aims to analyze the impact of moving the new capital city on the economy and society in East Kalimantan Province. This research includes qualitative research using library methods. The transfer of IKN has a big impact on improving the economy because of the contribution from government activities, both central, provincial and city districts related to IKN. The service and hospitality business sector in Balikpapan has received many positive influences. It is hoped that moving the capital city will reduce welfare and realize sustainable development in Indonesia. The relocation of the National Capital will have a major impact on the structure of society, way of life, and socio-cultural aspects. The move of the new national capital to Kalimantan has had a very significant impact on the economic and social sectors of the province of East Kalimantan. Economic equality and increasing employment opportunities have an impact on the economic sector. The influence in the social sector is through changes in the structure, lifestyle and culture of society.

Keywords: *capital, kalimantan,social,economy*

Abstrak

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur didorong oleh ketimpangan sosial ekonomi dan kependudukan. Tujuan pemindahan Ibu Kota Negara ke luar jawa adalah untuk mengurangi beban ekologis seperti kemacetan yang parah, serta peningkatan polusi udara dan air. Pemindahan Ibu Kota Negara tidak menutup kemungkinan dapat menyebabkan berbagai masalah di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak pemindahan Ibukota Negara Baru terhadap ekonomi dan sosial di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif menggunakan metode kepustakaan. Pemindahan IKN sangat berdampak pada peningkatan perekonomian karena adanya kontribusi dari kegiatan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota terkait IKN. Bidang usaha jasa dan perhotelan di Balikpapan mendapat banyak pengaruh positif. Perpindahan ibu kota diharapkan dapat mengurangi kesenjangan dan mewujudkan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Pemindahan Ibu Kota Negara akan berdampak besar bagi struktur masyarakat, cara hidup, serta aspek sosial budaya. Pemindahan Ibu Kota Negara baru ke Kalimantan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap sektor ekonomi dan social bagi provinsi Kalimantan Timur. Pemerataan ekonomi dan peningkatan lapangan kerja merupakan dampak di sektor ekonomi. Pengaruh di bidang social adalah dengan adanya perubahan struktur, pola hidup dan budaya masyarakat.

Kata Kunci: *ibu kota, Kalimantan, ekonomi, sosial*

PENDAHULUAN

Ibu Kota Negara, ibu kota politik, atau Ibu Kota Negara berasal dari bahasa Latin *caput*, yang berarti "kepala". Ini juga terkait dengan kata "*capitol*", yang merujuk pada bangunan tempat pusat pemerintahan utama berada. Jakarta, sebagai ibu kota Indonesia, memiliki peran penting sebagai pusat pemerintahan yang dilindungi dan pusat negara. (liano hutasoit, 2018). Dalam konferensi pers yang diadakan di Istana Negara pada tanggal 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan keputusan untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Karena ibu kota bertanggung jawab atas aktivitas sosial, ekonomi, dan politik yang

signifikan, pemindahan ibu kota adalah tugas yang sulit dan dapat menyebabkan banyak masalah (Mazda 2022).

Ada banyak alasan mengapa Ibu Kota Negara harus dipindah. Sangat penting untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari daerah khusus ibukota (DKI) Jakarta karena berbagai faktor, termasuk sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan, dan kemanan, bahkan kemungkinan bencana alam. Selain itu, karena kepadatan penduduk yang tidak merata dan lebih banyak terkonsentrasi di pulau jawa telah menyebabkan kesenjangan di berbagai bidang dan stagnasi ekonomi yang tidak kunjung sembuh (Mazda, 2022).

Rencana pemindahan Ibu Kota Negara republik indonesia didorong oleh ketimpangan sosial ekonomi dan kependudukan. Sekitar 57,4% penduduk Indonesia terkonsenterasi di pulau jawa, sedangkan sebaran penduduk di Sumatera sebesar 17,9%, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 5,5%, Kalimantan sebesar 5,81%, Sulawesi sebesar 7,31%, Maluku dan Papua sebesar 2,61%. Ini menunjukkan aglomerasi pembangunan dan kemajuan yang tinggi di pulau jawa dan sebaliknya ketertinggalan di daerah lain. Tujuan pemindahan Ibu Kota Negara ke luar jawa adalah untuk mengurangi beban ekologis yang sudah sangat besar di Jakarta. Jakarta mengalami kemacetan yang parah, serta peningkatan polusi udara dan air (Mazda, 2022).

Menurut Visi Indonesia 2033, pada tahun 2010, kota pusat pemerintahan Indonesia dan pusat kegiatan negara akan pindah ke tempat di Kalimantan. Ini akan menciptakan episentrum baru yang mendekati sebagian besar kawasan tertinggal dan pinggiran yang selama ini tidak pernah dihidupkan oleh proyek pembangunan seperti transmigrasi dan percepatan pembangunan daerah(Liano Hutasoit 2018). Ibu kota IKN akan pindah ke kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Kalimantan Timur dipilih untuk IKN baru karena berbagai alasan. Salah satunya adalah lokasinya yang mudah diakses, dekat dengan dua kota besar, Balikpapan dan Samarinda. Penduduknya beragam dan terbuka. Potensi konflik rendah. Juga, ia memiliki infrastruktur utama yang lengkap karena didukung oleh bandar udara dan pelabuhan. Selain itu, ada 3 waduk yang sudah ada, 2 waduk yang direncanakan, 4 sungai, dan 4 daerah aliran sungai. Perencanaan iklim jangka panjang direncanakan akan berlangsung sampai tahun 2045, dengan pengembangan iklim dimulai pada tahun 2022. (Saraswati dkk. 2022).

Diharapkan pemindahan ibu kota ke Kalimantan akan membantu meningkatkan status Indonesia sebagai negara laut dan mendukung tujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, diharapkan pemindahan ibu kota akan membantu meningkatkan kualitas sosial dan ekonomi di Kalimantan Timur.

Studi oleh Dwi Jayanti dkk. (2020) menemukan bahwa perubahan dan pemenuhan kebutuhan manusia dalam agenda pemindahan ibukota dapat menyebabkan konflik sosial. Potensi konflik ini dapat dicegah dengan memastikan pemenuhan kebutuhan sesuai prioritas, melewati tahapan pemindahan yang matang, dan program lain untuk menjaga stabilitas masyarakat (Dwi Djayanti dkk. t.t.).

Selanjutnya tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dampak pemindahan Ibukota Negara Baru terhadap ekonomi dan sosial di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan instansi atau masyarakat yang terkait

KAJIAN LITERATUR

Konsep pembangunan berkelanjutan menjadi populer setelah dikumandangkan oleh komisi bruntland di bawah pimpinan perdana menteri Norwegia Gro Harlem Brundtland yang bekerja sejak oktober 1984 sampai dengan maret 1987 dan melahirkan buku “Our Common Future” yang diterbitkan oleh World Commission On Environment And Development (WECD) pada tahun 1987 (Ismid Hadad, 2010). Selama abad 20 terjadi 2 (dua) revolusi terkait dengan peranan lingkungan hidup dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Revolusi pertama (1) antara 1960’s -1970’s saat munculnya paradigma bahwa terdapat konflik antara konsep

pertumbuhan dan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan di mana setiap terjadi pembangunan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat selalu dibarengi dengan eksploitasi sumberdaya alam dan terjadinya kerusakan lingkungan (Meadows, Donella Dan Meadows, Nancy, 1972).

Meadows dan Meadows yang tergabung dalam kelompok roma menulis buku mengenai "batas-batas pertumbuhan". Dalam buku tersebut dikemukakan bahwa kalau tidak ada pengurangan tingkat konsumsi dalam masyarakat kala itu, maka dalam waktu 100 tahun lagi dunia akan collaps, karena sumberdaya alam akan habis dan lingkungan mengalami pencemaran yang tinggi dan kerusakan yang sangat parah. Konsep pembangunan berkelanjutan yang dimaknai sebagai pembangunan untuk masa kini dan yang tidak memerlukan kompromi generasi yang akan datang muncul pada pertemuan bangsa-bangsa di norwegia yang diketuai oleh perdana menteri norwegia gro harlem brundtland pada tahun 1987. Di saat itulah seolah-olah terjadi revolusi ke 2 (dua) di bidang pembangunan nasional yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi tidak semata-mata merusak lingkungan, tetapi justru pembangunan ekonomi dan pembangunan lingkungan dapat bersinergi satu sama lain (Suparmoko 2020).

Secara bahasa, ibu kota atau dalam bahasa inggris disebut sebagai capital city berasal dari bahasa latin yakni caput yang berarti kepala (head). Dalam black's law dictionary, kata capital mempunyai banyak makna tergantung dalam konteks yang dipergunakan. Berkaitan dengan ibu kota, black's law dictionary mengartikan capital sebagai place where legislative department holds its sessions and where chief offices of the executive are located; political and governmental metropolis. Capital juga dapat diartikan sebagai seat of government. Dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa ibu kota lazimnya juga merupakan pusat pemerintahan, pusat bisnis dan pusat kekuasaan dan kebijakan di suatu negara tersebut (Hadi dan Ristawati 2020).

Jakarta merupakan ibu kota Indonesia, memiliki peran penting sebagai pusat negara dan pusat pemerintahan yang dilindungi dalam undangundang. Jakarta sebagai ibu kota tentunya membedakan semua daerah meskipun memiliki kewenangan yang sama sebagai sebuah provinsi, tentunya kota Jakarta sebagai ibu kota mempunyai status istimewa sebagai ibukota, memiliki peranan penting mempengaruhi kekuasaan politik, ekonomi, pembangunan dan hal penting lainnya kepada setiap provinsi yang ada.

Ekonomi itu sendiri berasal dari bahasa yunani yaitu dari kata oikomonia, kata ini berasal dari kata oikos dan nomos, oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti tata laksana atau pengaturan. Jadi ekonomi berarti pengaturan tata laksana rumah tangga, pekataan ekonomi mengandung arti tentang hubungan manusia dalam usahanya dalam memenuhi kebutuhannya.

Ekonomi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online "ekonomi adalah ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal kekayaan, perindustrian, dan perdagangan); pemanfaatan uang, tenaga, waktu dan sebagainya yang berharga; tata kehidupan perekonomian (suatu negara); urusan keuangan rumah tangga (organisasi, negara) ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan benda dan dengan segala macam aspek yang dibutuhkan.

Samuelson menjelaskan bahwa ilmu ekonomi memang berkaitan dan sangat berdekatan dengan ilmu-ilmu sosial, seperti ilmu politik, psikologi, sejarah, dan antropologi adalah ilmu-ilmu sosial yang sering bertumpang tindih dengan apa yang dipelajari oleh ilmu ekonomi. Tetapi keterkaitan antardisiplin ilmu dalam bidang ekonomi merupakan fakta yang perlu disusun dan diatur dengan tujuan untuk pengembangan dan pengujian teori ekonomi itu sendiri.

Ekonomi mempersoalkan usaha manusia untuk meningkatkan kemakmurannya, baik secara perseorangan maupun secara berkelompok (keluarga, bangsa dan masyarakat). Sebagai suatu ilmu, ekonomi tentunya memiliki objek material (apa yang dipelajari) dan objek formal (bagaimana mempelajarinya). Objek material ekonomi meliputi produksi, distribusi, pembagian kerja, pembangunan, sistem moneter dan keuangan, perdagangan dan dunia usaha.

Sedangkan objek formal ekonomi meliputi kemakmuran manusia di masa sekarang dan masa depan (Ahman dan Rohmana 2019).

Pengertian sosial berasal dari bahasa Inggris yaitu society asal kata socius yang berarti kawan. Selanjutnya yang dimaksud dengan sosial adalah segala sesuatu mengenai masyarakat dan kemasyarakatan. Sedangkan menurut Soedjono Soekanto, bahwa yang dimaksud dengan sosial adalah prestise secara umum dari seseorang dalam masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sosial adalah hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat atau sifat-sifat kemasyarakatan yang memperhatikan kepentingan umum.

Ilmu sosial merupakan tinjauan ilmiah yang membahas gejala-gejala yang muncul dalam kehidupan sosial insani. Berdasarkan pengalaman seharihari, kita menyadari bahwa gejala sosial itu bermacam ragam coraknya. Atau bisa juga, satu gejala sosial mengandung beberapa yang kompleks. Akibatnya, ilmu pengetahuan sosial harus terbagi lagi menjadi beberapa cabang ilmu.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono 2006).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif untuk dapat memahami fenomena dalam konteks sosial secara alamiah yang menggambarkan permasalahan sosial pada seseorang mengenai sudut pandang perilaku. Dalam penelitian kualitatif peneliti menganalisis dan setelah itu melaporkan fenomena dalam suatu hasil analisa dalam penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi lengkap mengenai dampak pemindahan ibukota negara baru terhadap ekonomi dan sosial di Provinsi Kalimantan Timur.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pemindahan Ibu Kota Negara Baru

Reformasi IKN yang pertama diumumkan oleh Presiden Sukarno pada 17 Juli 1957. Mengingat Palangkaraya terletak di wilayah selatan dan timur semenanjung Indonesia , maka Sukarno mengakuinya sebagai IKN . Soekarno juga ingin menyampaikan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu menciptakan IKN kontemporer . Ide khusus tersebut tidak pernah terwujud. Sebaliknya, Presiden Soekarno mendeklarasikan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia dengan menandatangani Memorandum dan Pasal No. 10 pada tanggal 22 Juni 1964 .Pada masa Orde Baru, tahun 1990-an, ada juga wacana pemindahan IKN ke Jonggol.

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono , kebangkitan IKN disebabkan oleh kemacetan dan masalah banjir Jakarta . Pada poin ini , ada tiga pilihan yang muncul: Jakarta terus memperkuat posisinya sebagai IKN sekaligus menjadi hub pemerintahan dengan melakukan ekspansi ke daerah tetangga dan membentuk IKN baru. IKN belakangan mendapat kecaman keras dari Presiden Joko Widodo .Joko Widodo. Pada tanggal 29 April 29 2019, Jokowi mengumumkan niatnya untuk mengubah RPJMN 2020–2024 dan memindahkan IKN keluar pulau Jawa. Jokowi mengumumkan niatnya untuk mengubah RPJMN 2020–2024 dan memindahkan IKN keluar pulau Jawa.

Urgensi tindakan cepat pembelaan Ibu Kota Negara untuk menyelesaikan IKN di atas, maka perlu disadari urgensi penyelesaian IKN ke masa lalu. Dengan Visi Indonesia 2045 atau Indonesia Maju, perekonomian negara ini diperkirakan akan mencapai peringkat kelima terbesar di dunia pada tahun 2045. Diperkirakan PDB per kapita sebesar US $23.119 pada

tahun ini. Diperkirakan Indonesia akan lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah pada tahun 2036. Sebab, diperlukan transformasi ekonomi guna mencapai Visi Indonesia 2045. revolusi industri melemahkan transformasi ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penegakan peraturan, dan reformasi birokrati yang dimulai pada tahun 2020an dan berlanjut hingga tahun 2024-an. Sebab, diperlukan IKN yang dapat mendukung dan menghambat transformasi ekonomi tersebut.

Kedua, IKN harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata termasuk di Kawasan Timur Indonesia. Selama ini, Jakarta dan sekitarnya terkenal dengan pusat segalanya (pemerintahan, politik, industri, perdagangan, investasi, teknologi, budaya dan lain-lain). Tidak mengherankan jika perputaran uang di Jakarta mencapai 70 persen yang luasnya hanya 664,01 km² atau 0.003 persen dari total luas daratan Indonesia 1.919.440 km². Sementara jumlah penduduknya 10,56 juta jiwa atau 3,9 persen dari jumlah penduduk Indonesia 270,20 juta jiwa (data tahun 2020). Hal ini menyebabkan ketidakmerataan pembangunan dan kesejahteraan di Indonesia. Pembangunan tersentralisasi di Jakarta dan pulau Jawa. Kondisi ini kurang baik untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diharapkan sustainable, tidak termanfaatkannya potensi daerah secara optimal, kurang mendukung keadilan antara daerah, dan rentan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh sebab itu dibutuhkan IKN yang dapat menjawab tantangan tersebut yaitu kota yang berkelas dunia untuk semua rakyat Indonesia. IKN yang berlokasi di Kalimantan diharapkan "pusat gravitasi" ekonomi baru di Indonesia termasuk di kawasan tengah dan timur Indonesia. IKN baru diharapkan dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan memaksimalkan potensi sumber daya daerah.

Ketiga, kondisi objektif Jakarta yang tidak cocok lagi sebagai IKN. Hal ini bisa dilihat dari "beban" yang harus ditanggung Jakarta antara lain:

1. Kepadatan penduduk 16.704 jiwa/km² sementara kepadatan penduduk Indonesia hanya 141 jiwa/km².
2. Kemacetan Jakarta merupakan kota termacet nomor 10 di dunia tahun 2019, walau menurun menjadi nomor 31 dari 416 kota besar di 57 negara tahun 2020 (TomTom Traffic Index).
3. Permasalahan lingkungan dan geologi yang muncul antara lain banjir tahunan di Jakarta dan tanah menurun yang menyebabkan sebagian besar wilayah negara ini berada di bawah permukaan laut. Pro dan kontra selalu hadir dalam delegasi IKN dari Jakarta hingga Kalimantan. Namun sebagai negara demokrasi , ketika negara telah menyetujui perubahan IKN melalui proses demokrasi melalui UU , maka seluruh komponen negara harus diperbaiki. Bangsa Indonesia harus mengurangi jumlah ekses mindahan IKN. Tidak ada satu pendapat pun yang dapat menyatukan seluruh masyarakat, namun pendapat yang memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia secara lebih luas sebaiknya diabaikan saja karena dianggap sebagai peringatan terhadap bias dan korupsi di NKRI . (Kemenkeu RI 2022).

Dampak pemindahan IKN terhadap sektor ekonomi Provinsi Kalimantan Timur

Pengembangan lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara kemungkinan besar didasarkan pada analisis dan penelitian terkait titik tengah wilayah Indonesia, yang akan memfasilitasi lahan timur dan tengah untuk keperluan pengembangan potensi wilayah. Simbol nasional baru yang hanya memiliki empat pandangan: pertama sebagai representasi identitas Bangsa; kedua sebagai kota yang cerdas, hijau, indah, dan berkelanjutan; yang ketiga sebagai yang modern, yang keempat internasional sebagai

simbol pemerintahan yang efektif dan efisien; dan kelima sebagai pedoman pembangunan perekonomian di wilayah Timur Indonesia.

Pemindahan Ibu Kota Negara tidak hanya sekedar memindahkan pusat Pemerintahan semata. Tetapi juga sebagai pemerataan ekonomi wilayah Indonesia terdiri dari pulau jawa, tetapi tersebut berada di luar pulau jawa, terutama wilayah timur. Pemindahan Ibu Kota Negara sebagai bagian dalam pemerataan Ibu Kota Negara. Potensi sumber daya energi surya sumber daya energi di seluruh Indonesia harus dimanfaatkan seefisien mungkin untuk mendukung proses pertumbuhan ekonomi melalui lapangan kerja yang tersedia di seluruh Indonesia harus dimanfaatkan seefisien mungkin untuk mendukung proses pertumbuhan ekonomi melalui kesempatan kerja yang tersedia. (Pribadi 2022).

Dipilihnya kawasan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi Ibu Kota Nusantara (IKN), menjadi daya Tarik tersendiri. Bidang usaha jasa dan perhotelan di Balikpapan mendapat banyak pengaruh positif. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni menjelaskan sejak ditetapkannya Provinsi Kalimantan Timur menjadi Ibu kota baru Indonesia, *multiplier effect* (efek pengganda) sangat luar biasa dan sudah dirasakan oleh masyarakat di sekitar lokasi IKN maupun daerah penyangga seperti Balikpapan. “Sejak ditetapkannya Provinsi Kalimantan Timur menjadi Ibu Kota Nusantara, alhamdulillah okupansi perhotelan di Kota Balikpapan mengalami peningkatan,” jelas Sri Wahyuni kepada rombongan Ketua dan Anggota Komite I DPD RI menyebut dampak positif pemindahan IKN ke Kalimantan Timur.

Mantan Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur itu menambahkan, pemindahan IKN merupakan anugerah bagi masyarakat Kalimantan Timur, karena sangat berdampak pada peningkatan perekonomian. Peningkatan perekonomian tersebut karena adanya kontribusi dari kegiatan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota terkait IKN. “Banyak kegiatan yang dilaksanakan di Kota Minyak Balikpapan, baik itu dari pemerintahan untuk perencanaan pembangun IKN sendiri, serta beberapa individual atau pengusaha-pengusaha yang datang ke Balikpapan dengan beberapa kegiatan untuk investasi ke depan, sehingga berdampak pada okupansi perhotelan maupun peningkatan perekonomian daerah,” jelas Sri Wahyuni (Cinthia 2022).

Dampak Aspek Sosial Dari Pemindahan Ibukota Negara Baru

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menghimpun masukan publik terkait aspek sosial budaya dan sosial ekonomi dalam Dialog Nasional Ibu Kota Negara yang ke-7. Pemindahan Ibu Kota Negara bertema “Membangun Kualitas Kehidupan Sosial Budaya” di Balai Purnomo Prawiro pada hari Selasa (25/02).

Pemindahan Ibu Kota Negara akan berdampak besar bagi struktur masyarakat, cara hidup, serta aspek sosial budaya. Berbagai faktor menjadi pertimbangan perlunya dilakukan pemindahan IKN. Faktor sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan dan kemanan, bahkan sampai dengan potensi bencana alam menjadi pertimbangan pentingnya IKN dipindahkan dari Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.

Kepadatan penduduk yang tidak merata dan cenderung terkonsentrasi di Pulau Jawa telah berdampak pada kesenjangan dalam berbagai aspek dan stagnasi ekonomi yang tidak kunjung dapat diperbaiki. Kesenjangan sosial ekonomi dan kependudukan merupakan salah satu faktor pendorong rencana pemindahan IKN Republik Indonesia. Sekitar 57,4% penduduk Indonesia terkonsenterasi di Pulau Jawa. Sementara sebaran penduduk di Sumatera sebesar 17,9%, Bali dan Nusa Tenggara 5,5%, Kalimantan 5,81%, Sulawesi 7,31%, Maluku dan Papua 2,61%. Padatnya jumlah penduduk di Pulau Jawa menunjukkan adanya aglomerasi pembangunan dan kemajuan yang tinggi di Jawa dan sebaliknya ketertinggalan di wilayah lainnya.

Penetapan perpindahan ibu kota ke wilayah Timur Indonesia diharapkan dapat mengurangi kesenjangan dan mewujudkan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan, serta mewujudkan ibu kota baru yang sesuai dengan identitas bangsa. Ibu Kota Negara Baru mempunyai lima visi, yaitu sebagai simbol identitas bangsa; sebagai kota yang smart, green, beautiful dan sustainable; modern dan berstandar internasional; tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif; serta sebagai pendorong pemerataan ekonomi di Kawasan Timur.

Bappenas mengkajian, mengumpulkan data, dan melakukan analisis yang difokuskan untuk mendeskripsikan dan menganalisis aspek-aspek kehidupan masyarakat lokal meliputi, Karakteristik sosial-budaya, karakteristik sosial-ekonomi. Analisis permasalahan dan dampak negatif yang mungkin timbul dari pemindahan dan kehadiran IKN terhadap masyarakat lokal. Rumusan pegangan prinsip (guiding principles) kebijakan sosial pemindahan IKN. "Perkiraan kondisi sosial dan budaya yang akan terjadi nantinya di Ibu Kota Negara Baru, keberagaman budaya makin meningkat bukan hanya etnis tapi ekonomi dan tingkat pendidikan, urbanisasi dan mengarah munculnya kota metropolitan, terbukanya peluang usaha dan bekerja yang dapat memicu konflik sosial antar kelompok etnis serta keberadaan simbolisasi nasional dan kekayaan budaya lokal di Ibu Kota Negara" tambah Rudy Soeprihadi. Pemindahan IKN diharapkan dapat menguatkan ketahanan masyarakat Kalimantan, baik secara ekologi, ekonomi, sosial dan budaya sehingga tidak menyebabkan terpinggirnya masyarakat lokal oleh pendatang.

Pendatang tidak hanya ASN namun juga keluarga dan pelaku ekonomi lainnya. Dalam rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN), berkembang dua skenario yang memperkirakan perpindahan sebesar 182.462 orang ASN dan 118.513 orang ASN (jika dibatasi umur hingga 45 tahun). Perpindahan ASN tersebut akan diikuti dengan keluarga dan pelaku ekonomi lainnya, yang diperkirakan sebesar 1,5 juta orang di masa mendatang. Masyarakat berharap agar integrasi kehidupan masyarakat yang berkeadilan dapat terjadi sehingga manfaat pembangunan IKN dirasakan oleh seluruh masyarakat Kalimantan khususnya dan Indonesia umumnya (FISIP UI 2020).

KESIMPULAN

Pemindahan Ibu Kota Negara baru ke Kalimantan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap sektor ekonomi dan social bagi provinsi Kalimantan Timur. Pada sektor ekonomi, pemindahan IKN dapat menciptakan pemerataan ekonomi yang baik antara pulau jawa dan luar jawa. Bagi provinsi Kalimantan timur, okupansi perhotelan di daerah ibukota baru mengalami peningkatan. Pemindahan IKN juga merupakan anugerah bagi masyarakat Kalimantan Timur, karena sangat berdampak pada peningkatan perekonomian. Peningkatan perekonomian tersebut karena adanya kontribusi dari kegiatan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota terkait IKN. Disisi lain, jumlah lapangan kerja semakin banyak sehingga menurunkan tingkat pengangguran di provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya pemindahan Ibu Kota Negara akan berdampak besar bagi struktur masyarakat, cara hidup, serta aspek sosial budaya masyarakat. Pemindahan ibu kota Negara baru berpengaruh terhadap adanya pendatang baru baik ASN maupun pelaku ekonomi lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ahman, H. Eeng, dan Yana Rohmana. 2019. "Konsep-Konsep Dasar Ilmu Ekonomi." *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* 1(1).

Cinthia. 2022. "DAMPAK IKN, OKUPANSI HOTEL MENINGKAT." *Pemprov Kalimantan Timur*. Diambil 26 November 2023 (https://www.Kalimantan Timurprov.go.id/berita/dampak-ikn-okupansi-hotel-meningkat).

Dwi Djayanti, Hana, I. Gede Sumertha, Anang Puji Utama, dan Prodi Damai Dan Resolusi Konflik Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan. t.t. *Potensi Konflik Sosial Dalam Pemindahan Ibukota Negara Republik Indonesia | POTENSI KONFLIK SOSIAL DALAM*

PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA REPUBLIK INDONESIA THE POTENTIAL OF SOCIAL CONFLICT IN CAPITAL RELOCATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA.

FISIP UI. 2020. "Kajian Aspek Sosial Pemindahan Ibu Kota Negara." *Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia*. Diambil 26 November 2023 (https://fisip.ui.ac.id/en/kajian-aspek-sosial-pemindahan-ibu-kota-negara/).

Hadi, Fikri, dan Rosa Ristawati. 2020. "Pemindahan Ibu Kota Indonesia dan Kekuasaan Presiden dalam Perspektif Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 17(3):530–57. doi: 10.31078/jk1734.

Herdiana, Dian. 2022. "Pemindahan Ibukota Negara: Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik." *Jurnal Transformative* 8(1):1–30. doi: 10.21776/ub.transformative.2022.008.01.1.

Kemenkeu RI. 2022. "Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara." *Kementrian Keuangan RI*. Diambil 26 November 2023 (https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.html).

Liano Hutasoit, Wesley. 2018. "ANALISA PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA." *Jurnal Dedikasi* 19(1).

Mazda, Chadziqatun Najilatil. 2022. *ANALISIS DAMPAK PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA (IKN) TERHADAP SOCIAL SECURITY*. Vol. 6.

Pribadi, Deny SlametUtomo, Setiyo. 2022. "Jurnal Persaingan Usaha Deny."

Ria, Reni, Armayani Hasibuan, dan Siti Aisa. 2020. "DAMPAK DAN RESIKO PERPINDAHAN IBU KOTA TERHADAP EKONOMI DI INDONESIA."

Saraswati, Manda Kumoro, Emmanuel Ariananto, Waluyo Adi, Kepala Subbidang Perhubungan, Udara Sekretariat, Kabinet Ri, Analis Hukum, Subbidang Subbidang, Perubahan Iklim, Pelestarian Lingkungan, dan Hidup Sekretariat. 2022. "Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Provinsi Kalimantan Timur Berdasarkan Analisis Swot." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 6(2):2598–9944. doi: 10.36312/jisip.v6i1.3086/http.

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* . Bandung: Alfabeta.

Suparmoko, Muhammad. 2020. "KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN REGIONAL." *Jurnal Ekonomika dan Manajemen* 9(1).